

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

OLEH:

SAHAT WAHYU REZKY UJUNG

185210411

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan metode yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan bantuan program *Eviews 10* untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 24 bank yang konsisten terdaftar di otoritas jasa keuangan selama periode 2015 sampai dengan 2021 dengan *puposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel. Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel CAR dan NPL tidak memiliki pengaruh terhadap ROA secara parsial. Sedangkan LDR memiliki pengaruh yang signifikan dan BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA secara parsial.

Kata kunci: CAR, NPL, LDR, ROA, dan OJK

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT THE FINANCIAL PERFORMANCE OF REGIONAL DEVELOPMENT BANKS IN INDONESIA

BY:

SAHAT WAHYU REZKY UJUNG

185210411

The purpose of this study is to analyze the factors that affect the financial performance of Regional Development Banks in Indonesia. The data used are secondary data and the method used is panel data regression analysis with the help of the Eviews 10 program to obtain a comprehensive picture of the relationship between one variable and another. The sample in this study consisted of 24 banks that were consistently registered with the financial services authority during the period 2015 to 2021 with purposive sampling as the sampling method.

The result of this study is that the CAR and NPL variables have no partial effect on ROA. While LDR has a significant effect and BOPO has a significant negative effect on ROA partially.

Keywords: CAR, NPL, LDR, and ROA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan rasa Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat, petunjuk dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERKA KEUANGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Tuhan Yang Maha Esa, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, S E, MM, CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abd. Razak Jer, SE., M.Si selaku ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Hamdi Agustin, SE., MM selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan terkhusus dosen manajemen keuangan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam berkat didalam Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua Penulis Bapak Jahalben Ujung dan Ibu Delpita Simbolon yang selalu memberikan segenap cinta, kasih sayang, doa, perhatian, dukungan, semangat dan motivasi yang tiada hentinya. Terimakasih untuk segala pengorbanan yang telah kalian berikan. Kalilan adalah motivasi terkuat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan memberikan kalian berkat yang melimpah dan selalu dilindungi dari segala mala bahaya dan dilimpahkan selalu kesehatan.
7. Kepada sahabat seangkatan, seperjuangan, Dharma Yuscha SE, Fitri Rahma Yanti SE, Nursamsiah Nasution SE, Wike Aprila Rosita SE, Risnal Rinanda SE, Egi Widarma SE, Muhammad Fuadi SE, Muhammad Liga Permadi SE, Eblon Deo Sitompul SE, yang selalu menemani hari-hari penulis dari awal perkuliahan, tempat bertukar pikiran, tempat bertanya, saling membantu dan mensupport satu sama lain. Terima kasih telah ada dalam suka mau pun duka yang selalu gila, dan menguras dompet sampai menipis. Semoga kita bisa berkumpul kembali,

8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuannya, masukan, dan motivasi.

Semoga semua bantuan dan motivasi dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang jelas lebih baik dari Tuhan. Dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis. Semoga karya penulis ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 2022

SAHAT WAHYU REZKY UJUNG
NPM. 185210411

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 : Latar Belakang	1
1.2 : Rumusan Masalah	7
1.3 : Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 : Sistematika Penelitian	8
BAB II : TELAAH PUSTAKA	
2.1 : Bank Pembangunan Daerah (BPD)	11
2.1.1 : Pengertian Bank Pembangunan Daerah (BPD).....	11
2.1.2 : Peran dan Fungsi BPD Untuk Perekonomian Daerah.....	12
2.1.3 : Tujuan Bank Pembangunan Daerah (BPD)	13
2.2 : Laporan Keuangan	13
2.2.1 : Pengertian Laporan Keuangan	13
2.2.2 : Tujuan Laporan Keuangan	14
2.3 : Analisis Laporan Keuangan	15
2.3.1 : Pengertian Analisis Laporan Keuangan	15
2.3.2 : Tujuan Analisis Laporan Keuangan	16

2.4	: Kinerja Keuangan	18
2.4.1	: Pengertian Kinerja Keuangan	18
2.4.2	: Tujuan dan Manfaat Kinerja Keuangan	19
2.4.3	: Pengukuran Kinerja Keuangan	20
2.5	: Rasio Keuangan	21
2.5.1	: Pengertian Rasio Keuangan	21
2.5.2	: <i>Return On Asset (ROA)</i>	22
2.5.3	: <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	23
2.5.4	: <i>Non Performing Loan (NPL)</i>	24
2.5.5	: <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	25
2.5.6	: <i>Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)</i>	26
2.5.7	: Pengaruh CAR terhadap ROA	27
2.5.8	: Pengaruh NPL terhadap ROA	28
2.5.9	: Pengaruh LDR terhadap ROA	29
2.5.10	: pengaruh BOPO terhadap ROA	30
2.6	: Penelitian Terdahulu	31
2.7	: Kerangka Pikiran	34
2.8	: Hipotesis	34
 BAB III : METODE PENELITIAN		
3.1	: Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.2	: Desain Penelitian	35
3.3	: Variabel Penelitian	35
3.4	: Populasi dan Sampel	36

3.4.1	: Populasi	36
3.4.2	: Sampel	36
3.5	: Jenis dan Sumber Data	38
3.6	: Teknik Pengumpulan Data	38
3.7	: Operasional Variabel Penelitian	38
3.8	: Teknik Analisis Data	40
3.8.1	: Analisis Regresi Data Panel	40
3.8.2	: Penentuan Model Estimasi	41
3.8.2.1	: Common Effect atau Pooled Least Squae (PLS)	41
3.8.2.2	: Fixed Effect Model (FEM)	41
3.8.2.3	: Random Effect Model (REM)	42
3.8.3	: Tahapan Analisis Data	42
3.8.3.1	: Uji Chow	42
3.8.3.2	: Uji Hausman	42
3.8.4	: Uji Asumsi Klasik	43
3.8.4.1	: Uji Normalitas	43
3.8.4.2	: Uji Multikolinearitas	44
3.8.4.3	: Uji Autokorelasi	44
3.8.4.4	: Uji Heteroskedastisitas	45
3.8.5	: Pengujian Hipotesis	45
3.8.5.1	: Uji Statistik F (Signifikansi Simultan)	45
3.8.5.2	: Uji Statistik t (Signifikansi Parameter Individual)	46
3.8.5.3	: Uji Determinasi (R^2)	46

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1	: Sejarah Bank Pembangunan Daerah (BPD)	48
1	: BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	48
2	: BPD Dki Jakarta	48
3	: BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	49
4	: BPD Jawa Tengah	49
5	: BPD Jawa Timur	51
6	: BPD Jambi	51
7	: BPD Sumatera Utara	52
8	: BPD Sumatera Barat	53
9	: BPD Riau dan Kepulauan Riau	54
10	: BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	55
11	: BPD Lampung	56
12	: BPD Kalimantan Selatan	58
13	: BPD Kalimantan Barat	58
14	: BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	59
15	: BPD Kalimantan Tengah	59
16	: BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	60
17	: BPD Sulawesi Utara Gorontalo	60
18	: BPD Bali	62
19	: BPD Nusa Tenggara Timur	63
20	: BPD Maluku dan Maluku Utara	64
21	: BPD Papua	65
22	: BPD Bengkulu	66
23	: BPD Sulawesi Tengah	67
24	: BPD Sulawesi Tenggara	67

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1	: Analisis Variabel Penelitian	69
5.1.1	: <i>Return On Asset (ROA)</i>	69
5.1.2	: <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	71
5.1.3	: <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	72
5.1.4	: <i>Non Performing Loan (NPL)</i>	74
5.1.5	: <i>Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)</i>	76
5.2	: Pemilihan Model Regresi Data Panel	78
5.3	: Uji Asumsi Klasik	82
5.3.1	: Uji Normalitas	82
5.3.2	: Uji Multikolinearitas	82
5.3.3	: Uji Heteroskedastisitas	83
5.3.4	: Uji Autokorelasi	84
5.4	: Pengujian Hipotesis Dengan Regresi Data Panel	85
5.4.1	: Pengaruh Variabel CAR, NPL, LDR, dan BOPO terhadap ROA secara simultan (Uji F)	85
5.4.2	: Pengaruh Variabel CAR, NPL, LDR, dan BOPO terhadap ROA secara Parsial (Uji t)	86
5.4.3	: Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)	88
5.5	: Pembahasan Hasil Penelitian	89
5.5.1	: Variabel CAR terhadap ROA	90
5.5.2	: Variabel NPL terhadap ROA	90

5.5.3	: Variabel LDR terhadap ROA	91
5.5.4	: Variabel BOPO terhadap ROA	91

BAB VI : PENUTUP

6.1	: Kesimpulan	92
6.2	: Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Return On Asset periode 2015-2021	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1	Data Sampel Penelitian	37
Tabel 3.2	Operasional Variabel Penelitian	39
Tabel 5.1	Hasil Uji Chow	77
Tabel 5.2	Hasil Uji Hausman	77
Tabel 5.3	Hasil Uji Multikolinearitas	79
Tabel 5.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas	79
Tabel 5.5	Hasil Uji Autokorelasi	80
Tabel 5.6	Hasil Uji F	81
Tabel 5.7	Hasil Uji t	82
Tabel 5.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	85
Tabel 5.9	Tabel Hubungan Variabel Independen Terhadap ROA	85

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran	34
Gambar 5.1 Return On Asset (ROA) Perusahaan Sampel	70
Gambar 5.2 Capital Adequacy Ratio (CAR) Perusahaan Sampel	71
Gambar 5.3 Loan to Deposit Ratio (LDR) Perusahaan Sampel	72
Gambar 5.4 Non Performing Loan (NPL) Perusahaan Sampel	74
Gambar 5.5 Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan perbankan saat ini sangat dominan dengan sistem keuangan. Bahkan perbankan saat ini juga mempunyai peranan yang penting untuk menunjang kemajuan perekonomian dalam suatu Negara. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan tentang Perbankan, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali kedalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dapat diartikan sebagai lembaga “penengah” di industri keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk; tabungan, giro, deposito. Dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit ke masyarakat. Bank sendiri bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbankan sendiri diatur dalam Undang-undang. Di mana menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank juga memberikan jasa bank lainnya. Tujuan bank sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Menurut UU yang tadi disebutkan, secara garis besar tujuan perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari

tujuan tersebut maka perbankan (bank) di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan didasarkan atas asas demokrasi ekonomi.

Perbankan sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya perbankan dapat dibedakan menjadi bank konvensional dan bank daerah. bank konvensional adalah bank yang beroperasi seperti bank pada umumnya. Tetapi, yang dapat membedakan perbankan konvensional dan perbankan pembangunan daerah adalah dari segi kepemilikan sahamnya. Untuk perbankan konvensional sendiri, kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta, pemerintah pusat, atau masyarakat. Sementara, bank pembangunan daerah adalah bank umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi di berbagai daerah. Dan faktor-faktor lain yang membedakan bank konvensional dan bank pembangunan daerah adalah:

- 1) strategi perolehan dana pihak ketiga (DPK), di mana bank konvensional memperoleh dana pihak ketiga hanya dari nasabah saja sedangkan bank pembangunan daerah dapat memperoleh dana pihak ketiga dari suntikan dana pemerintah daerah.
- 2) Pemberian bunga kredit. Untuk pemberian bunga kredit, mayoritas bunga kredit yang diberikan oleh bank pembangunan daerah lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Dan yang terakhir
- 3) Syarat dalam pemberian kredit yang berbeda. Di mana syarat pemberian kredit dari bank pembangunan daerah lebih mudah dibandingkan dengan bank konvensional.

Peranan bank sangatlah penting bagi pembangunan perekonomian bagi Negara maupun sebuah Daerah. Daerah-daerah di Indonesia yang memiliki bank nya sendiri atau disebut dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang memiliki peran untuk menunjang perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Secara umum, Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank yang didirikan dan dimiliki sebagian atau seluruh sahamnya oleh Pemerintah Daerah (Agustin, 2013: 39). BPD beroperasi seperti Bank Umum lainnya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun Bank BPD mempunyai karakteristik berbeda dengan Bank Umum Lainnya. Keberadaan BPD tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian daerah, dana milik pemerintah, khususnya Pemda. Pendirian BPD adalah untuk mendorong pembangunan di daerah. BPD diarahkan untuk menopang pembangunan infrastruktur, UMKM, pertanian, dan lainlain kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah (Sunarsip, 2009).

Salah satu keunikan sistem perbankan di Indonesia adalah keberadaan Bank Pembangunan Masyarakat (BPD) yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah. BPD dikategorikan sebagai bank fokus, yaitu bank dengan fokus daerah. Dengan demikian, BPD mampu menciptakan struktur perbankan yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong berlangsungnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Beberapa penelitian telah mendokumentasikan bahwa bank pemerintah memiliki aset yang lebih rendah, biaya yang lebih tinggi dan kualitas aset yang lebih rendah. dibandingkan bank swasta (Berger, dkk., 2004; Micco, dkk., 2004; Berger, dkk., 2005). Selain itu, Cornett, dkk. (2010) menyatakan bahwa bank pemerintah memperoleh

keuntungan yang lebih rendah, memiliki modal yang kecil dan risiko pinjaman yang tinggi, sehingga menurunkan kinerja bank. Mereka menemukan bahwa dalam krisis keuangan, bank pemerintah memiliki kinerja yang lebih baik daripada bank swasta dalam hal arus kas, basis modal dan kualitas pinjaman. Dan setelah krisis keuangan, bank swasta memiliki kinerja yang lebih baik daripada bank pemerintah dalam hal rasio kecukupan modal, kualitas aset dan efisiensi manajemen.

Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang/penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan. Sementara itu KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman organisasidan tata kerja bank pembangunan daerah pasal 2 juga mengatakan bahwa BPD dibangun adalah untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan BPD sebagai Bank.

Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki potensi semakin besar di era otonomi daerah yaitu sebagai akselerator sekaligus mendinamisasi perekonomian yang bertujuan untuk menggerakkan pembangunan di daerah. Pengelolaan BPD yang profesional, akuntabel, serta memiliki daya saing yang tinggi akan memperkuat peran BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai

penggerak pembangunan dan ekonomi daerah. Selain berfungsi sebagai bank komersial, BPD dituntut tetap memainkan peran dalam memberikan fasilitas dana pembangunan daerah, baik proyek investasi maupun modal kerja. Namun, di sisi lain sebagai bagian dari kebijakan perbankan nasional, BPD juga wajib mengikuti regulasi yang ditentukan Bank Indonesia (BI) (Marfu'ah, 2012).

Berikut ini rata-rata dari Return in Assets dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia periode tahun 2015-2021 yang disajikan dalam bentuk tabel data, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Return on Asset periode 2015-2021

No	Nama Bank	Tahun							Rata - Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	2,04	2,22	2,01	1,71	1,68	1,66	1,73	1,86
2	BPD Dki Jakarta	0,89	2,29	2,04	2,24	2,31	1,56	1,58	1,84
3	BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	2,94	3,05	2,88	2,84	3,01	2,27	2,16	2,74
4	BPD Jawa Tengah	2,6	2,6	2,69	2,66	1,88	2,03	2,2	2,38
5	BPD Jawa Timur	2,67	2,98	3,12	2,96	2,73	1,95	2,05	2,64
6	BPD Jambi	2,43	2,92	3,65	3,06	2,72	3,17	3,2	3,02
7	BPD Sumatera Utara	2,31	2,74	2,65	2,09	2,21	1,89	2	2,27
8	BPD Sumatera Barat	2,28	2,19	1,86	2,03	2,06	1,78	1,9	2,01
9	BPD Riau dan Kepulauan Riau	1,69	2,75	2,3	1,97	1,74	2,54	1,93	2,13
10	BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	2,18	2,23	1,83	1,93	1,86	2	2,01	2,01
11	BPD Lampung	3,25	2,85	2,44	2,27	2,31	2,76	2,19	2,58
12	BPD Kalimantan Selatan	2,2	2,6	1,83	1,31	1,41	1,83	1,77	1,85
13	BPD Kalimantan Barat	2,91	2,88	2,94	2,71	2,73	2,91	2,51	2,80
14	BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1,56	2,99	2,71	2,39	1,2	1,22	1,33	1,91
15	BPD Kalimantan Tengah	4,34	4,24	3,84	3,87	3,17	2,94	2,8	3,60
16	BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	4,9	4,96	3,56	3,67	3,36	3,12	3,09	3,81
17	BPD Sulawesi Utara Gorontalo	1,56	2	2,8	2,3	1,44	1,6	1,24	1,85
18	BPD Bali	3,33	3,76	3,16	3,17	3,08	2,7	2,62	3,12
19	BPD Nusa Tenggara Timur	3,44	2,94	2,98	2,77	2,26	2,03	1,85	2,61
20	BPD Maluku dan Maluku Utara	3,56	3,15	3,14	3,07	2,78	2,81	2,99	3,07
21	BPD Papua	2,6	1,28	0,61	1,24	1,35	1,67	1,76	1,50

22	BPD Bengkulu	2,88	2,78	2,02	1,76	2,15	2,06	1,38	2,15
23	BPD Sulawesi Tengah	3,1	2,91	2,49	2,51	2,51	3,07	3,15	2,82
24	BPD Sulawesi Tenggara	3,41	3,87	3,92	4,01	3,73	3,54	3,39	3,70
Rata-Rata		2,71	2,88	2,64	2,52	2,32	2,30	2,20	

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi OJK Periode 2015-2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat nilai rata-rata ROA dari tahun 2015 sampai dengan 2021, didapat bahwa BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memiliki rata-rata terbesar yakni 3,81% dan yang memiliki rata-rata nilai ROA terendah yakni BPD Papua dengan rata-rata 1,50%. Sementara rata-rata pertahun didapati tahun 2016 memiliki rata-rata terbesar dengan 2,88% dan yang terendah di tahun 2021 dengan rata-rata 2,20%. Menurut peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 mengenai standar terbaik nilai ROA yaitu sebesar 1,5%.

Cara menilai baik atau tidaknya suatu perbankan adalah dengan melihat kinerja keuangannya. Bagaimana posisi keuangan, informasi keuangan dan kinerja perusahaan pada suatu periode sebelumnya, kemudian digunakan sebagai dasar memprediksi kinerja keuangan yang akan datang. Berkaitan dengan kinerja keuangan bank, maka rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio profitabilitas. Jumingan (2014:239) menyatakan, Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank.

Salah satu informasi penting dalam keuangan adalah informasi mengenai laba. Informasi ini sangat penting karena laba menjelaskan bagaimana kinerja perusahaan selama satu periode di periode lalu. Menurut Nusantara (2009),

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja bank adalah Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Loan to Deposits Ratio (LDR) dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu (Munawir, 2010:33). Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Return on Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang penting bagi bank karena digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan total aktivitya. Semakin besar ROA menunjukkan peningkatan profitabilitas bank. (Riski , 2013).

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang terjadi di atas, maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia”.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pemahaman lebih dalam tentang pengembangan kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.
2. Bagi Objek yang diteliti, diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman supaya bisa meningkatkan kinerja keuangannya dengan baik pada masa yang akan datang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi sebagai pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Daftar isi yang direncanakan akan terbagi menjadi enam bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang berisikan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data dan teknik pengumpulan data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian seperti tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang diteliti seperti, sejarah terbentuknya perusahaan, dan visi dan misi perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan serta menemukan jawaban dalam masalah-masalah penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Kemudian pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu juga menjelaskan apa saja keterbatasan dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitiannya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Bank Pembangunan Daerah (BPD)

2.1.1 Pengertian Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang /penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan. Sementara itu KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah pasal 2 juga mengatakan bahwa BPD dibangun adalah untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan BPD sebagai Bank.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank yang didirikan dan dimiliki sebagian atau seluruh sahamnya oleh Pemerintah Daerah (Agustin, 2013: 39). BPD beroperasi seperti Bank Umum lainnya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun Bank BPD mempunyai karakteristik berbeda dengan Bank Umum Lainnya.

2.1.2 Peran dan Fungsi BPD Untuk Perekonomian Daerah

Bank memiliki peran yang baik dan prospektif dalam mendukung pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Peran bank dalam aktifitas sehari-hari di masyarakat, dapat ditunjukkan melalui pertumbuhan bank yang makin hari makin banyak, sebagai upaya meningkatkan perekonomian dalam negeri, dengan kemudahan dalam bertransaksi. BPD memiliki peran yang penting sebagai mitra Pemerintah, sekaligus kendaraan percepatan pembangunan daerah. Ketika ekonomi suatu negara sedang mengalami kontraksi atau melambat, salah satu tindakan yang biasa diambil pemerintah negara itu adalah meminta bank untuk menggenjot penyaluran kredit, supaya roda ekonomi dapat bergerak.

Secara umum sebagai lembaga, bank berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit, memperlancar transaksi perdagangan dan pembayaran uang, memperlancar mekanisme atau lalu lintas pembayaran, dan pemberian fasilitas atau kemudahan mengenai aliran dana dari yang kelebihan, kepada yang membutuhkan dana. Selain itu juga bank dapat mengatur stabilitas uang dan layanan jasa lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Keberadaan BPD tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian daerah. Selain menjalankan kegiatan bank umum, BPD juga berfungsi sebagai kasir Pemda, seperti dana realisasi APBD. Sehingga, BPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok bank lainnya (BUMN, swasta, asing dan campuran) yakni sebagian besar DPK merupakan dana milik

pemerintah, khususnya Pemda. Pendirian BPD adalah untuk mendorong pembangunan di daerah. BPD diarahkan untuk menopang pembangunan infrastruktur, UMKM, pertanian, dan lainlain kegiatan ekonomi dalam rangkapembangunan daerah (Sunarsip, 2009).

2.1.3 Tujuan Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Dalam bidang pembangunan, pemerintah pada 25 Mei 1996 mendirikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ketentuannya diatur dalam UU No.13/1996. Bank ini didirikan dengan tujuan untuk membantu melaksanakan pembangunan daerah yang merata keseluruh daerah Indonesia. Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembanguunan ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan bank swasta.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Definisi laporan keuangan dalam **SAK 2007: 1 pasal 7**, yaitu: Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta penjelasan yang merupakan bagian integral keuangan.

Menurut Martono (2014), laporan keuangan (*Financial Statement*) merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan secara garis besar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan aliran kas.

Kemudian menurut Kasmir (2006:239) menjelaskan bahwa “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan dan menunjukkan kinerja manajemen bank untuk melihat bagaimana kondisi bank sesungguhnya untuk melihat kelebihan dan kelemahan yang dimiliki”.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Hans (2016 : 126) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam rangka likuidasi entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi. Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya pemilik

mayoritas. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Menurut Hutaeruk (2017 : 10) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Berdasarkan beberapa uraian tentang tujuan laporan keuangan menurut para ahli, maka tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan sebuah perusahaan sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang akan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajemen dimasa yang akan datang.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Pengertian Analisis Laporan Keuangan menurut (Hutaeruk, 2017) terdiri dari dua kata yaitu Analisis dan Laporan Keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kata ini, maka dapat dijelaskan dari arti masing-masing kata. Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu

unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laba rugi, dan arus kas. Jika dua pengertian ini digabungkan, analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

V. Wiranta Sujarweni (2017:6) menyebutkan bahwa, analisis laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat suatu keadaan keuangan perusahaan, bagaimana pencapaian atau keberhasilan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan prediksi di masa mendatang, analisis laporan keuangan tersebut akan digunakan dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut (Hutauruk, 2017) analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Secara lengkap kegunaan analisis laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Dapat menilai prestasi perusahaan
- 2) Dapat memproyeksi keuangan perusahaan
- 3) Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek waktu tertentu, yaitu posisi keuangan (aset, neraca dan modal), hasil usahaperusahaan (hasil dan biaya), likuiditas, solvabilitas, aktivitas serta rentabilitas atau profitabilitas
- 4) Melihat komposisi struktur keuangan (arus dana).
- 5) Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.
- 6) Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan dan sebagainya.
- 7) Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang.

Tujuan analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil (Munawir, 2010:31).

2.4 Kinerja Keuangan

2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan ini merupakan suatu usaha formal yang dilakukan suatu perusahaan untuk kemudian mengevaluasi efisien serta juga efektivitas dari aktivitas atau kegiatan perusahaan yang sedang berjalan di periode waktu tertentu. Secara garis besarnya , pengertian dari kinerja keuangan ini adalah suatu hasil kerja segala macam bagian di dalam suatu perusahaan yang dapat atau bisa dilihat di situasi atau kondisi keuangan dari perusahaan itu pada suatu periode tertentu berhubungan aspek penghimpunan serta penyaluran dana yang dinilai dengan berdasarkan indikator kecukupan likuiditas, kemudian modal, serta juga profitabilitas perusahaan. Kinerja keuangan ini kemudian juga diartikan sebagai suatu gambaran dari pencapaian suatu perusahaan yang berupa hasil yang sudah atau telah diraih yakni dengan melalui segala macam kegiatan atau aktivitas untuk kemudian meninjau sejauh mana suatu perusahaan tersebut sudah atau telah melaksanakan standar akuntansi keuangan

Menurut Fahmi (2018: 142) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar. Sedangkan menurut Jumingan (2006:239), Kinerja keuangan menurut Jumingan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode

tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Kinerja Keuangan

Menurut Sujarweni (2017:71), tujuan dari penilaian kinerja, yaitu:

1. Untuk mengetahui likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajibannya yang harus segera dipenuhi.
2. Untuk mengetahui solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui profitabilitas/rentabilitas yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil.

Sedangkan manfaat kinerja keuangan menurut Sujarweni (2017:71), yaitu:

1. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai pencapaian perdepartemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan.
3. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.

4. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal.

2.4.3 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja diaplikasikan perusahaan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan operasionalnya supaya bisa bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses mengkaji secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi pada keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Menurut Prastowo (2015:81) return on total assets adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk mendapatkan laba. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan salah satu rasio profitabilitas yakni return on assets (ROA). Peneliti menggunakan return on assets (ROA) sebab dianggap dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu perusahaan serta prospek perusahaan di masa mendatang. Karna perusahaan saat melakukan analisa dengan menggunakan ROA sudah dapat melihat bahwa perusahaan memiliki laba atau keuntungan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Rumus yang digunakan dalam mencari return on total assets adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.5 Rasio Keuangan

2.5.1 Pengertian Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2015:104) rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Menurut Harahap (2015:297) rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Rasio keuangan berguna untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan dan menilai kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan melakukan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka. Angka-angka ini akan menjadi lebih apabila kita dapat bandingkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan periode tertentu.

Institute for Development of Economic and Finance – INDEF (2005) mengemukakan beberapa rasio yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja perbankan yaitu: ROA (return on asset), ROE (return on equity), CAR (capital adequacy ratio), NPL (net performing loan), NIM

(net interest margin), BOPO (beban operasional dan pendapatan operasional), LDR (loan to deposit ratio), rasio pendapatan non bunga bersih, pertumbuhan kredit dua tahun, pertumbuhan operasional dua tahunan dan rasio utilitas kredit.

2.5.2 Return on Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Kinerja sebuah perusahaan dikatakan baik apabila menghasilkan ROA yang tinggi dan menunjukkan laju peningkatan dari waktu ke waktu. ROA termasuk dalam salah satu rasio profit. Jadi, semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan, berarti perusahaan tersebut semakin baik kinerjanya dalam menghasilkan laba bersih.

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan (Kasmir, 2012:201) Standar yang diberikan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 ROA > 1,5 % dalam kerangka penilaian kesehatan bank. Semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin efisien bank tersebut dari segi penggunaan aktiva di dalam menghasilkan profit.

Menurut Kasmir (2014:201), “ Return on Aseet adalah bagian analisis rasio profibilitas. Rasio antara laba bersih yang berbanding terbalik

dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Dengan kata lain Return On Asset (ROA) dapat didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba yang bias diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Sedangkan menurut Menurut Fahmi (2012:98) menyatakan return on assets menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak.

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.5.3 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal juga berfungsi untuk membiayai operasi, sebagai instrument untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Kecukupan modal merupakan suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka.

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut rasio permodalan merupakan modal pasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal ini digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Faktor utama yang cukup mempengaruhi jumlah modal bank adalah

jumlah modal minimum yang ditentukan oleh penguasa moneter yang biasanya merupakan wewenang bank sentral.

Menurut Bank Indonesia, CAR adalah rasio perbandingan antara modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). CAR menunjukkan seberapa besar modal bank telah memadai menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha bank bersangkutan (Dendawijaya, 2003).

Menurut Lutumerissa (2009) menyatakan, “Bahwa tingkat atau jumlah modal bank yang memadai (capital adequacy ratio) diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi di era deregulasi saat ini. Jumlah modal yang memadai memegang peranan penting dalam memberikan rasa aman kepada calon atau para penitip uang. Namun masih terdapat perbedaan cara dalam menentukan tingkat permodalan yang sehat”.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2.5.4 *Non Performing Loan* (NPL)

NPL (Non Performing Loan) adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas. Menurut BI, rasio NPL yang ideal berkisar di angka 5%. Rasio di atas 5% menunjukkan kredit macet lebih banyak daripada kredit lancar. Rasio NPL yang digunakan untuk mengukur performa perbankan yaitu rasio NPL netto. Rasio ini dihubungkan dengan risiko kredit lewat proses analisis yang menyeluruh.

Berdasarkan laporan keuangan berbagai bank di Indonesia, umumnya menunjukkan angka 3%. Artinya plafon rasio NPL tersebut masih di bawah ketentuan BI. Walaupun begitu, perlu diwaspadai jika tren angka dari naik dari tahun ke tahun. Bank perlu meningkatkan performa dengan berbagai cara.

Pengertian non performing loan (NPL) menurut Mahmoedin (2010:1) adalah kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit. Sedangkan menurut Kasmir (2013:155) pengertian non performing loan (NPL) adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa pengertian non performing loan (NPL) merupakan rasio untuk mengukur besarnya risiko kredit bermasalah pada suatu bank yang diakibatkan oleh ketidak lancaran dalam pembayaran pokok pinjaman yang dilakukan oleh pihak nasabah sehingga kinerja bank menurun dan menjadi tidak efisien.

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2.5.5 Loan to Deposits Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap

kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. LDR paling sering digunakan oleh analis keuangan dalam menilai suatu kinerja bank terutama dari seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank.

Menurut Riyadi, (2015:199) Loan to Deposit Ratio merupakan perbandingan total kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Bank. Rasio ini akan menunjukkan tingkat kemampuan Bank dalam menyalurkan dananya yang berasal dari masyarakat (berupa: Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Berjangka dan Kewajiban Segera Lainnya) dalam bentuk Kredit. Jika dikembangkan lebih lanjut maka dibandingkannya tidak hanya terhadap Kredit tetapi ditambah dengan Surat Berharga Yang Diterbitkan (Obligasi) dan Modal Inti. Menurut Kasmir (2014:225) “LDR (Loan to Deposit Ratio) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.”.

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.5.6 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari

penggunaan aktiva tersebut. Bank yang tidak mampu memperbaiki tingkat efisiensi usahanya maka akan kehilangan daya saing baik dalam hal mengerahkan dana masyarakat maupun dalam hal penyaluran dana tersebut dalam bentuk modal usaha. Efisiensi dapat diukur dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Menurut Rivai dkk (2007:722) pengertian BOPO adalah perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan profitabilitas meningkat (Dendawijaya, 2003).

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.5.7 Pengaruh CAR terhadap ROA

Modal bank merupakan “engine” dari kegiatan bank, jika kapasitas mesin terbatas maka sulit bagi bank tersebut untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya khususnya dalam penyaluran kredit. CAR dibawah 8% tidak mempunyai peluang untuk memberikan kredit. Kegiatan utama bank ialah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dengan CAR yang cukup atau memnuhi ketentuan bank sehingga terciptalah

laba. Semakin tinggi CAR semakin baik kinerja pada suatu bank. Penyaluran kredit yang optimal, dengan asumsi tidak terjadi macet akan menaikkan laba yang akhirnya akan meningkatkan ROA. Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank (Mawradi, 2005).

Semakin menurun CAR, maka semakin rendah tingkat profitabilitas yang diperoleh (Prasnanugraha, 2007). Menurut Restiyana (2011), semakin besar Capital Adequacy Ratio (CAR), maka keuntungan bank juga semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank”.

2.5.8 Pengaruh NPL terhadap ROA

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengatasi kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit yang dimaksud adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga. Bank dalam memberikan kredit harus menganalisis kemampuan pihak ketiga atau debitur tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu apabila bank mempunyai NPL yang tinggi, maka biaya yang dikeluarkan untuk menutup kredit yang bermasalah juga tinggi, sehingga dengan kondisi tersebut akan mempengaruhi kinerja suatu bank.

Wibisono (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Return on Assets (ROA). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi NPL, maka akan

semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aset (NPL) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa semakin besar Non Performing Loan (NPL), maka Return On Assets (ROA) yang diperoleh akan semakin kecil.

Dengan kata lain bahwa ketika NPL tinggi, maka tingkat laba ditahan bank juga ikut tinggi, sehingga akan mengakibatkan pendapatan turun dan berdampak juga terhadap penurunan profitabilitas bank. NPL yang rendah mengidentifikasi kinerja keuangan bank semakin baik. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Ponco (2008), Hardiyanti (2012) yang menyebutkan bahwa variabel NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. NPL yang rendah mengindikasikan kinerja keuangan bank semakin baik.

2.5.9 Pengaruh LDR terhadap ROA

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu masalah yang kompleks dalam kegiatan operasional bank, hal tersebut dikarenakan dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Dendawijaya (2009:118) likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo.

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011; 420) Non performing loan (NPL) merupakan suatu kondisi di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank. Non performing loan (NPL) mencerminkan risiko kredit. Bank Indonesia telah menetapkan angka untuk rasio non performing loan (NPL) adalah sebesar 5%. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dalam hal ini semakin besar NPL akan mengakibatkan menurunnya ROA dan jika NPL turun dan semakin kecil ROA akan semakin meningkat dan kinerja keuangan bank semakin membaik.

2.5.10 Pengaruh BOPO terhadap ROA

BOPO merupakan rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2009). Rasio BOPO yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya.

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Dalam hal ini semakin tinggi BOPO akan mengakibatkan menurunnya ROA dan jika BOPO turun dan semakin kecil ROA akan semakin meningkat dan kinerja keuangan bank semakin membaik.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variable Penelitian	Hasil
1	Andreina Maria Kossuh, Maryam Mangantar, dan Imelda W.J.Ogi (2017)	Pengaruh <i>Non Performing Loan</i> (NPL), <i>Capital Adiquancy Ratio</i> (CAR), <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) terhadap Profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia tahun 2011-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen (Y) Profitabilitas • Variabel independen (X) <i>Non Performing Loan</i> (NPL), <i>Capital Adiquancy Ratio</i> (CAR), <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) 	Hasil uji t menunjukkan bahwa NPL nilai koefisien regresi dengan arah negatif sehingga NPL berpengaruh negatif terhadap ROA (signifikan). CAR memiliki nilai koefisien regresi dengan arah positif sehingga CAR berpengaruh positif terhadap ROA (signifikan). LDR memiliki nilai koefisien regresi dengan arah positif sehingga LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil uji f menunjukkan NPL, CAR, dan LDR secara simultan berpengaruh terhadap ROA.
2	Jhon Fernos, dan Elva Dona (2018)	Analisis Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Return On Assets PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen (Y) Return On Assets • Variabel independen (X) Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio 	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Loan To Deposit Ratio (LDR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahwa tingkat likuiditas PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sehat karena berada dalam kategori sehat yang ditetapkan BI yaitu LDR 94,75%. Kecukupan

				<p>Modal Rasio (CAR) Kondisi PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2017 sehat karena masuk dalam kategori sehat ditetapkan oleh BI yaitu CAR 8%. Return On Assets (ROA) pada PT. Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2016 sehat karena dalam keadaan sehat kategori yang ditetapkan BI sebesar ROA 1,215%. Namun pada tahun 2017 dilihat dari nilainya Return On Assets cukup sehat karena masuk dalam kategori cukup sehat ditetapkan BI sebesar ROA < 1,215%</p>
3	<p>Deyby Kansil, Sri Murni, dan Joy Elly Tulung (2017)</p>	<p>Pengaruh Risiko Perbankan Terhadap Kinerja Keuangan Tahun 2013-2015 (Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen (Y) Kinerja Keuangan • Variabel independen (X) <i>Non Performing Loan (NPL)</i>, <i>Net Interest Margin (NIM)</i>, <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>, <i>Biaya Operasional Pendapatan operasional (BOPO)</i> 	<p>Penelitian ini menggunakan metode spss dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan, NPL, NIM, LDR, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dan secara parsial, NPL signifikan dan berpengaruh negatif terhadap ROA, NIM signifikan dan berpengaruh positif terhadap ROA, LDR tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap ROA, BOPO signifikan dan berpengaruh negatif terhadap ROA. Lewat penelitian ini diketahui bahwa Risiko Perbankan yang diukur lewat empat rasio yang ada memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).Sebaiknya Bank Pembangunan Daerah harus mampu mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas usahanya.</p>

				Berkaitan dengan hasil penelitian dimana perusahaan harus meminimalkan NPL ,LDR dan rasio BOPO karena berpengaruh negatif terhadap ROA. Kemudian memaksimalkan NIM karena berpengaruh positif terhadap ROA, Dengan memperhatikan 5C (Character , Capacity, Capital, Collateral, Condition)
4	Yuda Dwi Nurcahya (2014)	Pengaruh Kinerja Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi, Dan Profitabilitas Terhadap ROA Pada Bank Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen (Y) Return On Assets (ROA) • Variabel independen (X) Kinerja Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi 	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FIR, dan NIM berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap ROA. Hasil penelitian ini adalah LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FIR, dan NIM berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap ROA. Ada tiga variabel yang tidak signifikan yaitu NPL, APB dan IRR. Variabel yang signifikan adalah LDR, IPR, BOPO, FIR, dan NIM.
5	Putu Desi Miadalyni, dan Sayu KT Sutrisna Dewi (2013)	Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Loan to Asset Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen (Y) Profitabilitas • Variabel independen (X) Loan to Deposit Ratio, Loan to Asset Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Kualitas Aktiva Produktif 	Hasil uji F menunjukkan bahwa loan to deposit ratio, loan to asset ratio, capital adequacy ratio, dan kualitas aktiva produktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar. Hasil uji t menunjukkan bahwa loan to deposit ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, loan to asset, capital adequacy ratio dan kualitas aktiva produktif berpengaruh

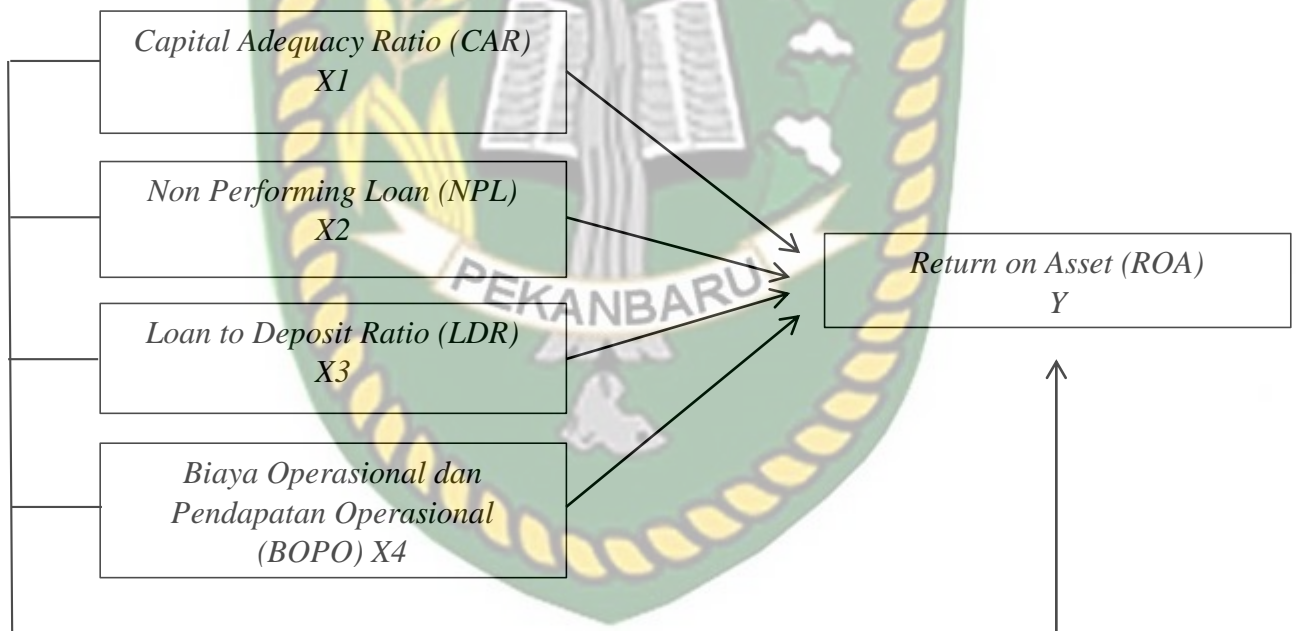
				negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.
--	--	--	--	---

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

2.7 Kerangka Pikiran

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikiran



2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah dipaparkan, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut :

“Diduga CAR, NPL, LDR, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di website resmi Otoritas Jasa Keuangan yaitu www.ojk.go.id dan objek penelitiannya pada perbankan yakni Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2015-2021.

3.2 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

3.3 Variable Penelitian

Variable penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variable terdiri atas 2 macam yaitu variable independen atau variable bebas (X) dan variabel dependen (Y). Variable dalam penelitian ini adalah :

- a. Variabel Y : Return on Asset (ROA)
- b. Variabel X : Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

3.4 Populasi dan sampel

3.4.1 Populasi

Menentukan populasi merupakan proses utama sebelum melakukan pemilihan sampel. Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian (Sugiyono, 2012) Defenisi populasi yang lebih rinci adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2012).

Populasi dalam penelitian ini merupakan semua Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015-2021, yaitu sebanyak 31 BPD yang terdaftar menjadi dalam populasi dalam penelitian ini.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dimiliki tujuan tertentu di mana teknik yang digunakan yakni non probability menurut Sugiyono (2016) non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Sementara itu jumlah sampel yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*, berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan

sebagai berikut:

1. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terdaftar pada Laporan Keuangan Publikasi di OJK yang mempunyai laporan keuangan paling lengkap dan telah dipublikasikan pada periode 2015-2021.
2. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terdaftar pada Laporan Keuangan Publikasi di OJK yang secara konsisten menyajikan data lengkap laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2015-2021.
3. BPD yang diteliti masih beroperasi pada periode waktu penelitian (2015-2021).

Berdasarkan kriteria-kriteria sampel diatas maka diperoleh 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun BPD yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat secara lebih jelas dalam tabel 3.4.2 berikut ini

Tabel 3.1
Data Sampel Penelitian

No	Nama BPD
1	BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk
2	BPD Dki Jakarta
3	BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
4	BPD Jawa Tengah
5	BPD Jawa Timur
6	BPD Jambi
7	BPD Sumatera Utara
8	BPD Sumatera Barat
9	BPD Riau dan Kepulauan Riau
10	BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
11	BPD Lampung
12	BPD Kalimantan Selatan
13	BPD Kalimantan Barat
14	BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

15	BPD Kalimantan Tengah
16	BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
17	BPD Sulawesi Utara Gorontalo
18	BPD Bali
19	BPD Nusa Tenggara Timur
20	BPD Maluku dan Maluku Utara
21	BPD Papua
22	BPD Bengkulu
23	BPD Sulawesi Tengah
24	BPD Sulawesi Tenggara

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi OJK

3.5 Jenis dan Sumber Data

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi di OJK periode 2015 sampai dengan 2021 yang dipublikasikan untuk umum dan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan, pencatatan dan penelaahan data sekunder berupa laporan keuangan dari perusahaan perbankan yakni Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015-2021 yang telah diaudit serta dipublikasikan dalam website resmi OJK (www.ojk.go.id).

3.7 Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian. Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel lain dan variabel independen (bebas) adalah

variabel yang nilai nya tidak tergantung pada variabel lain. Operasional

Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen	Konsep Variabel	Indikator
ROA	ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diraih oleh bank tersebut dari segi penggunaan aset.	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
Variabel Independen	Konsep Variabel	Indikator
CAR	CAR memperlihatkan seberapa jauh bank mengandung risiko ikut dibiayai dari modal sendiri, disamping memperoleh dana dari luar bank seperti masyarakat, pinjaman, dan lain-lain.	$\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$
LDR	LDR merupakan rasio yang menunjukkan tingkat risiko likuiditas bank. Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi bank dalam menyediakan alat-alat likuid untuk dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadinya penangguhan.	$\frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$
NPL	NPL merupakan rasio yang menunjukan kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank	$\frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$
BOPO	BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional. Rasio ini digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas bank dalam menekan biaya operasional sebagai usaha optimasi pendapatan.	$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Analisis Regresi Data Panel

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu (time series) dan data silang (cross section). Dalam menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain model *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Dari tiga model regresi yang bisa digunakan untuk mengestimasi data panel, model regresi dengan nilai terbaiklah yang akan digunakan dalam menganalisis. Untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan dalam menganalisis apakah dengan model *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Maka dilakukan pengujian terlebih dahulu menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman menggunakan program Eviews sebagai alat dalam menganalisis data.

Uji regresi data panel ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yang terdiri dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan *Beban Operasional dan Pendapatan Operasional* (BOPO) terhadap variabel dependen *Return On Asset* (ROA).

Model regresi data panel dalam penelitian ini adalaah:

$$Y_{ti} = \alpha + \beta_1 X_{1ti} + \beta_2 X_{2ti} + \beta_3 X_{3ti} + \beta_4 X_{4ti} + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Return On Asset)

α = Konstanta

- X1 = Variabel Independen 1 (Capital Adequacy Ratio)
- X2 = Variabel Independen 2 (Non Performing Loan)
- X3 = Variabel Independen 3 (Loan to Deposit Ratio)
- X4 = Variabel Independen 4 (Beban Operasional dan Pendapatan Operasional)
- e = error term
- t = waktu
- i = perusahaan

3.8.2 Penentuan Model Estimasi

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain (Dedi, 2012):

3.8.2.1 Common Effect atau Pooled Least Square (PLS)

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

3.8.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Model Fixed Effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intercep. Intercep antar perusahaan,

perbedaan intercep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi tetap antara perusahaan dan waktu.

3.8.2.3 Random Effect Model (REM)

Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan antara intercep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan teknik *Generalized Least Square* (GLS).

3.8.3 Tahapan Analisis Data

3.8.3.1 Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana yang terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk Cross-Section F

- Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model*
- Jika nilai $p < 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*

3.8.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk Cross-Section Random.

- Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model*.
- Jika nilai $p < 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Dengan pemakaian metode *Ordinary Least Squared* (OLS), untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih tepat, maka diperlukan pendeteksian apakah model tersebut menyimpang dari asumsi klasik atau tidak, deteksi tersebut terdiri dari:

3.8.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas, variabel tidak bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan metode jarque-bera (JB). Apabila nilai JB lebih kecil dari 2 maka data berdistribusi normal atau probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

Menurut Ajija, Shochrul Rohmatul dkk (2011) uji normalitas digunakan jika jumlah observasi adalah kurang dari 30, untuk mengetahui apakah error term mendekati distribusi normal. Jika jumlah observasi lebih dari 30, tidak perlu dilakukan uji normalitas. Sebab, distribusi sampling error telah mendekati normal.

3.8.4.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas dapat dinyatakan sebagai kombinasi kolinier dari variabel lainnya. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi ini ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Cara mendeteksi adanya multikolinearitas dilakukan dengan uji Variance Inflation Factor (VIF) yang dihitung dengan rumus berikut:

Jika $VIF > 10$, maka antar variabel bebas (independent variabel) terjadi persoalan multikolinearitas (Gujarati, 1993).

Untuk mengatasi masalah multikolinearitas, satu variabel independen yang memiliki korelasi dengan variabel independen lain harus dihapus. Dalam hal metode GLS, model ini sudah diantisipasi dari multikolinearitas.

3.8.4.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi. Autokorelasi muncul karna observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

3.8.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Suatu model regresi dikatakan terkena heteroskedastisitas apabila terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dan satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas

Adanya sifat heteroskedastisitas ini dapat membuat penaksiran dalam model bersifat tidak efisien. Umumnya masalah heteroskedastisitas lebih biasa terjadi pada data *cross section* dibandingkan dengan time series (Gujarati, 1978).

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yaitu dengan melihat hasil probabilitasnya, apabila $> 0,05$ maka terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas, bila lebih kecil maka untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas pada metode *FEM* dilakukan estimasi dengan pembobotan white.

3.8.5 Pengujian Signifikan

3.8.5.1 Uji Statistik F (Signifikansi Simultan)

Dalam pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan uji F pada tingkat keyakinan 95%

dan tingkat kesalahan dalam analisis (α) 5% dengan ketentuan *degree of freedom* (df_1) = $k-1$, *degree of freedom* (df_2) = $n-k$ dimana n adalah besarnya sampel, k adalah jumlah variabel. Dasar pengambilan keputusan adalah:

Jika $f\text{-hitung} < t\text{-tabel}$: H_0 diterima dan H_1 ditolak

Jika $f\text{-hitung} > t\text{-tabel}$: H_0 ditolak dan H_1 diterima

3.8.5.2 Uji Statistik t (Signifikansi Parameter individual)

Pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dai masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian parsial terhadap koefisien regresi secara parsial menggunakan uji-t pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan dalam analisis (α) 5% dengan ketentuan *degree of freedom* (df) = $n-k$, dimana n adalah besarnya sampel, k adalah jumlah variabel. Dasar pengambilan keputusan adalah:

Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$: H_0 diterima dan H_1 ditolak

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$: H_0 ditolak dan H_1 diterima

3.8.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi diantara nilai 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel model dependen (Gujarat, 2003).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, suatu pengukur kelayakan yang sesuai telah dikembangkan. Ukuran yang merupakan modifikasi dari R^2 ini memberikan penalti bagi penambahan variabel penjelas yang tidak menurunkan residual secara signifikan. Ukuran ini disebut adjusted R^2 (Doddy, 2012).



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4. Sejarah Bank Pembangunan Daerah (BPD)

1. BPD BANK JAWA BARAT DAN BANTEN

BPD Bank Jawa Barat dan Banten diawali oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor. 33 tahun 1960 tentang penentuan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya bergerak di bidang bank hipotek dan pada tanggal 20 Mei 1961 mendirikan Perusahaan Daerah “PT Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat”

Visi : Menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia.

Misi :

- Penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah
- Melaksanakan penyimpanan uang daerah
- Salah satu sumber pendapatan asli daerah

2. BPD DKI JAKARTA

BPD DKI Jakarta didirikan pertama kali dengan nama PT BPD Djakarta Raya. Fokus strategi BPD DKI pada tahun 2010 yaitu berkomitmen untuk menjadi Great Company dan Centre of Excellence yang meliputi Good Corporate Governance, Human Resources, Performance, Services, dan Corporate Social Responsibility yang dieksekusi secara sempurna guna mewujudkan pernyataan visi dan misi Bank DKI.

Visi : Menjadi bank terbaik yang membanggakan

Misi : Bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat, dan andalan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan terpadu dan profesional.

3. BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BPD Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan pada 15 Desember 1961, tujuan pendirian adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Visi: Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara khusus di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, terutama kredit skala kecil dan menengah serta mendorong program pemberdayaan perekonomian daerah.

Misi : Bank BPD DIY sebagai bank umum, bertujuan memperoleh laba yang wajar melalui penyediaan jasa-jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama kredit skala kecil dan menengah serta mendorong program pemberdayaan perekonomian daerah dalam upaya memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan daerah.

4. BPD JAWA TENGAH

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang. Tujuan didirikannya bank adalah untuk pengelolaan keuangan

daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.3 tahun 1969 menetapkan Bank Pembangunan Daerah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah No.1 tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (PD). Setelah program rekapitalisasi bank Jateng merubah bentuk dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Visi : Bank terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, dan menunjang pembangunan daerah.

Misi:

1. Memberikan pelayanan prima yang didukung oleh kehandalan SDM dengan teknologi modern serta jaringan yang luas.
2. Membangun budaya bank dan mempertahankan bank sehat.
3. Mendukung pertumbuhan ekonomiregional dengan mengutamakan kegiatan retail bank.
4. Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh bank

5. BPD JAWA TIMUR

Bank Pembangunan Jawa Timur yang selanjutnya dikenal dengan Bank Jatim didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Selanjutnya berdasarkan UU No. 3 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.2 tahun 1967 yang menyangkut status Bank Pembangunan Daerah dari Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Visi : menjadi bank yang sehat, berkembang secara wajar dan memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional.

Misi : mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta ikut mengembangkan usaha Kecil dan Menengah dan memperoleh laba yang optimal.

6. BPD JAMBI

BPD Jambi didirikan pada tanggal 12 Februari 1959. Sejak tanggal 22 November 2007 BPD Jmbi berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT), yaitu menjadi PT.BPD Jambi.

Visi : Menjadi bank ideal dan sehat dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang jasa bank yang memiliki nilai tambah bagi ekonomi daerah khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan pengelolaan profesional, kehati-hatian serta berkembang secara wajar.

Misi :

1. Mengembangkan usaha sebagai bank umum, secara konvensional dan atau berprinsip syariah.
2. Penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah.
3. Pemegang kas daerah, dan/atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
4. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah

7. **BPD SUMATERA UTARA**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1964 dengan status Perseroan Terbatas yang disebut dengan BPDSU. Pada tahun 1962 bentuk usaha BPD Sumatera Utara berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sejalan dengan program Rekapitalisasi, status badan hukum BPDSU dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas supaya

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1964 dengan status Perseroan Terbatas yang disebut dengan BPDSU. Pada tahun 1962 bentuk usaha BPD Sumatera Utara berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sejalan dengan program Rekapitalisasi, status badan hukum BPDSU dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas supaya saham milik pemerintah pusat dapat masuk untuk pengembangan dan di kemudian hari saham pihak ketiga dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga

berdasarkan hal tersebut, pada tahun 1999 bentuk hukum BPDSU berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Visi : menjadi bank andalan bagi membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Misi : Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip compliance.

8. BPD NAGARI (SUMATERA BARAT)

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Pada tahun 1973 perubahan badan hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai Peraturan Daerah Tk.I Propinsi Sumatera Barat No.4, selanjutnya berdasarkan SK. Direksi Bank Indonesia No.23/60/KEP/DIP maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Devisa. Pada tahun 1996 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mulai memperkenalkan namanya dengan call name Bank Nagari.

Visi : Menjadi Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang terkemuka dan terpercaya.

Misi :

1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang.

9. **BPD RIAU DAN KEPULAUAN RIAU**

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sesuai dengan UU No.13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status Bank Milik Pemerintah Daerah Riau. Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Sesuai Peraturan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah dilakukan perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Visi : Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkekmuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

Misi :

1. Sebagai bank sehat, elit, dan merakyat.
2. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah .
3. Sebagai pengelola dana Pemerintah.
4. Sebagai sumber pendapatan daerah.

5. Sebagai pembina, pengembang, dan pendamping usaha kecil menengah.

10. BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan pada tanggal 6 November 1957 dengan nama PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan. Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah, maka terhitung sejak tahun 1962, secara resmi seluruh kegiatan PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan menjadi milik Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan status badan hukum perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11/DPRDGR Tingkat I Sumatera Selatan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan dan sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000, Bank Sumsel mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Persero Terbatas dengan Akta Pendirian No. 20 tanggal 25 November 2000 dan persetujuan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.3/2/KEP.DpG/2001 tanggal 24 September 2001.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 tanggal 03 November 2009 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56914.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 20

November 2009, maka Bank Sumsel berubah nama menjadi Bank Sumsel Babel.

Visi : Menjadi Bank Sehat yang tumbuh secara berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan nasabah.

Misi

1. Mengembangkan dan membangun pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Sebagai pemegang kas daerah.
4. Sebagai agen pembangunan.
5. Membantu dan mengembangkan pengusaha golongan ekonomi lemah.
6. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang lebih tanggap terhadap tuntunan pembangunan daerah dan tuntunan pasar.
7. Mengoptimalkan keunggulan bisnis Retail Banking dan mengembangkan Corporate banking.

11. BPD LAMPUNG

Bank Lampung (Pt. Bank Pembangunan Daerah Lampung) yang resmi beroperasi tanggal 31 Januari 1966 berdasarkan izin usaha Menteri Usaha Bank Sentral No. Kep. 66/UBS/1965 dan berlandaskan Peraturan Daerah No. 8/PERDA/II/DPRD/73 didirikan dengan maksud membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian Bank Pembangunan Daerah

Lampung merubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 dan Akta Notaris Soekarno, SH Nomor 5 tanggal 3 Mei 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-8058 H.01.04 Tahun 2001 tanggal 6 Mei 1999.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan perekonomian dan perbankan, guna meningkatkan permodalan bank, daya saing, perluasan produk dan usaha bank serta dalam rangka memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilikan saham, dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai Bank Umum dan pemegang Kas Daerah.

Visi : Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya

Misi :

1. Memenuhi kebutuhan Masyarakat akan jasa Perbankan.
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan memiliki kompetensi tinggi.
3. Memiliki struktur permodalan yang kuat.
4. Pengembangan Infrastruktur Informasi Teknologi.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Corporate Image di masyarakat.
6. Melakukan kerjasama strategis antar bank dan lembaga lainnya

12. BPD KALIMANTAN SELATAN

BPD Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan No.4 Tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam perkembangan, Peraturan Daerah tersebut telah mengalami pengulangan beberapa kali dan yang terakhir adalah peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan No.11 tahun 2008 tentang bentuk hukum BPD KalSel dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Visi : Menjadi bank yang unggul di daerah dan berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

Misi :

1. Memberikan jasa perbankan yang berkualitas.
2. Penggerak pendorong ekonomi daerah.
3. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
4. Turut membina lembaga perkreditan atau Bank perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

13. BPD KALIMANTAN BARAT

BPD Kalimantan Barat didirikan pada 15 April 1964. Mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan pada tanggal 2 Februari 1999 telah disahkan dari Peraturan Daerah No.1 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama panggilan Bank KALBAR.

Visi : Menjadi perusahaan jasa perbankan yang berkinerja tinggi dan berkembang secara wajar serta memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

Misi : Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, mengelola dana pemerintah daerah, dan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah.

14. BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menyediakan layanan jasa perbankan sebagai Bank Umum. BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta pembangunan daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Visi : Sebagai Bank Kuat, Efisien, dan Dipercaya.

Misi : Menyediakan produk dan jasa perbankan secara dinamis dan berkesinambungan.

15. BPD KALIMANTAN TENGAH

BPD Kalteng didirikan pada tanggal 28 Oktober 1961 dengan nama PT. BPD Kalteng. Selanjutnya dengan peraturan Daerah No.10 Tahun 1999 tanggal 17 Juli 1999 menetapkan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Kalimantan Tengah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

Visi : Kokoh, Terpercaya dan Dinamis.

Misi : Membantu dan Mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

16. BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat didirikan di Makassar pada 13 Januari 1961 dengan nama PT.BPD Sulewesi Selatan Tenggara. Tanggal 12 Februari 1964, nama BPD Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi BPD Sulawesi Selatan. Dengan lahirnya Peraturan Daerah No.01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi 25 Milyar, BPD Sulawesi Selatan disahkan menjadi Perusahaan Daerah. Pada tahun 2003 BPD Sulawesi Selatan berubah status dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPD Sulawesi Selatan.

Visi : Menjadi bank kebanggaan , dan pilihan utama membangun kawasan timur Indonesia.

Misi :

1. Memberikan layanan prima, berkualitas dan terpercaya.
2. Mitra strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil.
3. Memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholde.

17. BPD SULAWESI UTARA

PT. Bank Sulut (Bank) dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara didirikan dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah berdasarkan Akte no. 88 tanggal 17 Maret 1961

yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan No. J.A.5/109/6 tanggal 13 Oktober 1961. Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Undang-undang no. 13 tahun 1964 tentang antara lain pembentukan propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara berubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara sesuai Peraturan Daerah tanggal 2 Juni 1964 berikut perubahan-perubahannya dan terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 84 tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 135/KMK.017/1999 dan No. 32/17/KEP/GBI tanggal 9 April 1999, Bank Sulut telah menandatangani Perjanjian Rekapitalisasi. Tahun 2004 Pemerintah RI melalui Menteri Keuangan telah menjual kembali (divestasi) seluruh saham negara pada Bank Sulut berdasarkan Perjanjian Jual beli seluruh Saham Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada PT. Bank Sulut tanggal 30 Juni 2004.

Visi : Menjadi perusahaan jasa perbankan yang profesional dan bertumbuh secara sehat.

Misi :

1. Sebagai bank fokus yang berorientasi pada bisnis ritel.
2. Sebagai penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah.

18. BPD BALI

Bank Pembangunan Daerah Bali didirikan pada tanggal 5 Juni 1962. Bank Bali turut berperan serta dalam pembangunan yaitu mensukseskan program pemerintah serta untuk menumbuhkan perekonomian. Mendukung dan aktif dalam kegiatan sosial dan pelestarian budaya untuk menunjang sektor pariwisata. Menciptakan dan mengembangkan usaha dengan peningkatan pelayanan, fasilitas dan jaringan serta jasa dan produk perbankan sesuai dengan permintaan pasar.

Visi : Menjadikan Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai bank yang sehat dan badan usaha yang tangguh dan terpercayadalam persaingan global, serta mampu memenuhi harapan stakeholder.

Misi :

1. Meningkatkan kompetensi individu dan organisasi.
2. Meningkatkan total kualitas sistem organisasi.
3. Meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan.
4. Meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk dapat menyediakan jasa pelayanan yang berkualitas dan harga yang kompetitif.

5. Meningkatkan program bisnis kemitraan secara horizontal dan vertikal baik lokal, regional, nasional maupun internasional.
6. Meningkatkan kontribusi bank pada daerah, Provinsi, Kabupaten maupun kotamadya.
7. Meningkatkan peran bank dalam kepeduliannya terhadap lingkungan terutama sosial budaya dan religius.

19. **BPD NUSA TENGGARA TIMUR**

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur didirikan dengan nama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan akta pendirian No.12 tanggal 18 Oktober 1961. Tanggal 26 Maret 1999 tentang perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Visi : Menjadi bank yang kuat, sehat, dan terpercaya

Misi :

1. Pelopor penggerak ekonomi rakyat.
2. Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
3. Meningkatkan sumberpendapatan asli daerah.
4. Mengoptimalkan fungsi Intermediasi bank melalui penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat melalui kredit.

20. BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA

Bank Maluku didirikan pertama kali pada tanggal 25 Oktober 1961 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Maluku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha Bank Pembangunan Daerah Maluku diubah menjadi Badan Usaha milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Maluku Nomor 1/DPRD-GR/1966 tanggal 01 Maret 1966 Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Bank Pembangunan Daerah, maka dilakukan penyesuaian dan penggantian atas Peraturan Daerah Propinsi Maluku No. 1/DPRGR/1966 tanggal 1 Maret 1966 dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku No. 03 tanggal 7 Juli 1987.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 02 Tahun 1999, tanggal 25 Mei 1999 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.71.719 tanggal 29 Juni 1999, bentuk badan hukum bank Pembangunan Daerah Maluku diubah daeri Perusahaan daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Visi: Terwujudnya Bank berkembang secara wajar, berpredikat sangat baik, mandiri, profesional serta terciptanya nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Misi: Mendorong dan mengembangkan laju perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

21. BPD PAPUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat Nomor:37/GIB/1966 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970 pada Lembaran Daerah Propinsi Irian Barat no. 42 tahun 1970, kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.283/DDK/II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan Modal Dasar pertama kali ditetapkan sebesar IB Rp.4.000.000,-.

Visi : Menjadi bank komersial yang Kuat, Unggul dan Terpercaya

Misi :

1. Membangun kelembagaan yang berdaya saing tinggi.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.
3. Mengelola dana Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta salah satu sumber pendapatan asli daerah.
4. Memberi Pelayanan Prima dan Kepuasan kepada Para Nasabah.

22. BPD BENGKULU

Bank Bengkulu didirikan pada tanggal 9 Agustus 1969 berdasarkan Surat Keputusan p.d. Gubernur Penguasa Daerah Provinsi Bengkulu. Selanjutnya dalam rangka memberdayakan BPD guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, maka pemerintah melaksanakan program rekapitulasi terhadap BPD termasuk BPD Bengkulu.

Dengan memperhatikan kondisi perbankan pada saat itu yang kurang baik maka untuk meningkatkan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu telah diikutsertakan dalam rekapitalisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, PT BPD Bengkulu yang mengikuti program tersebut diharuskan mengubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu atau yang disingkat menjadi PT Bank Bnegkulu.

Visi : Menjadikan bank yang berkinerja tinggi dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Misi :

1. Mengelola dan mengembangkan bank secara profesional, sehat, dinamis, dan kompetitif, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pemegang saham, Pengelola dan Masyarakat.
2. Penggerak pembangunan dan sebagai tuan rumah didaerahnya sendiri dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, simpatik, ramah dan memuaskan bagi masyarakat serta mitranya.

23. BPD SULAWESI TENGAH

Bank Sulteng (dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah/BPD Sulteng) adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah. Bank Sulteng berpusat di kota Palu. Bank Sulteng didirikan pada tahun 1969 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT BPD Sulteng). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sulawesi Tengah atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

24. BPD SULAWESI TENGGARA

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan mendapatkan izin operasional dari Menteri Keuangan No.D,15.6.1.18 tanggal 27 Januari 1970, yang kemudian telah diubah dengan Perda No.1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, Perda No. 2 tahun 1988 tanggal 8 April 1988 dan Perda No.2 tahun 1993 tanggal 13 Februari 1993.

BPD Sulawesi Tenggara pada masa-masa yang akan datang kinerja BPD Sulawesi Tenggara akan lebih ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka meningkatkan jaringan operasional dan

pengembangan usaha saat ini sedang diupayakan perubahan status BPD Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). BPD Sultra terdiri atas 41 kantor, yaitu 1 kantor pusat non operasional, 6 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu, 29 kantor kas, serta 30 Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Sampai dengan 31 Desember 2012 BPD Sultra memiliki 475 orang pegawai.

Visi : Mampu bersaing dan terkemuka di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui produk dan layanan kompetitif, memiliki manajemen yang handal serta didukung dengan personil yang profesional guna mendukung program dan rencana strategi pemerintah daerah dengan pendekatan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kemandirian dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional

Misi :

1. Menjadi Bank Umum yang sehat, terpercaya, inovatif dalam mengembangkan produk dan jasa Bank untuk memenuhi kebutuhan serta harapan para nasabah dan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan masyarakat secara profesional dengan menekankan pada keunggulan manajemen, orientasi pasar dan jiwa kewirausahaan.
3. Berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Variabel Penelitian

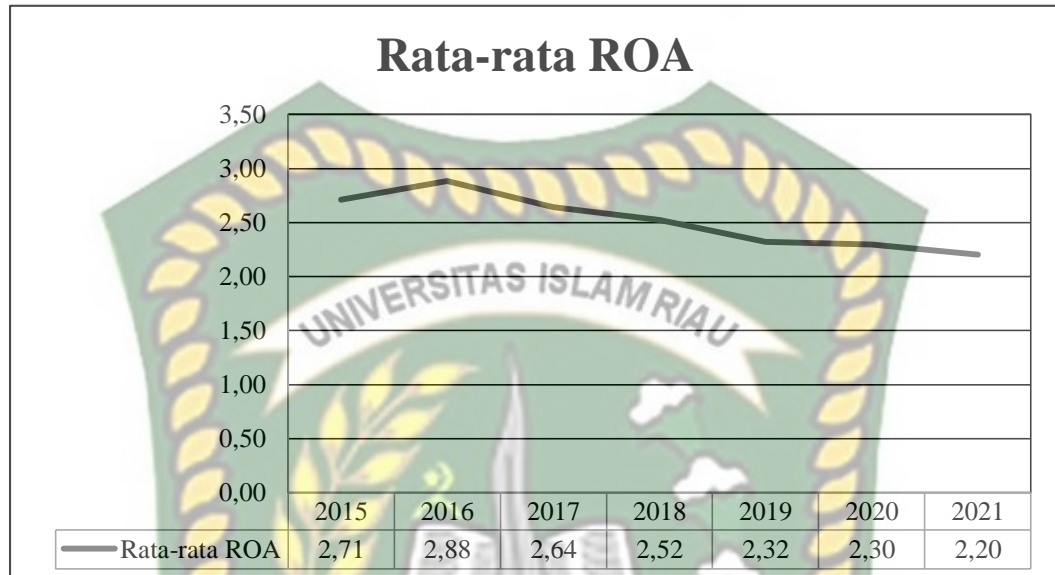
Bagian ini menggambarkan perolehan keseluruhan data (variabel) yang digunakan dalam menggambarkan pergerakan variabel untuk seluruh periode pengamatan. Pada penelitian ini digunakan variabel Return On Asset sebagai variabel dependen dan variabel independen adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit (LDR), Non Performing Loan (NPL), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

5.1.1. Return On Asset (ROA)

Dalam penelitian ini Return On Asset (ROA) digunakan sebagai tolak ukur dari kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Laporan Keuangan Publikasi di OJK. Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki. Fungsinya adalah untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut

Pada Gambar 5.1 Berikut dapat dilihat hasil perhitungan Return On Asset (ROA) pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode 2015 sampai dengan 2021:

Gambar 5.1
Return On Asset (ROA) Perusahaan Sampel



Sumber: data diolah 2022

Berdasarkan gambar 5.1 menunjukkan bahwa secara garis besar nilai rata-rata ROA mengalami fluktuatif setiap tahunnya selama periode 2015 sampai dengan 2021. Dimulai pada tahun 2015 dengan nilai rata-rata ROA sebesar 2,71% yang mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 2,88%, kemudian di tahun 2017 nilai rata-rata ROA sebesar 2,64% mengalami penurunan menjadi 2,52% di tahun 2018, kemudian di tahun 2019 menurun kembali menjadi 2,32% dan turun lagi di tahun 2020 menjadi 2,30%. Dan di tahun 2021 nilai rata-rata ROA mengalami penurunan kembali menjadi 2,20%.

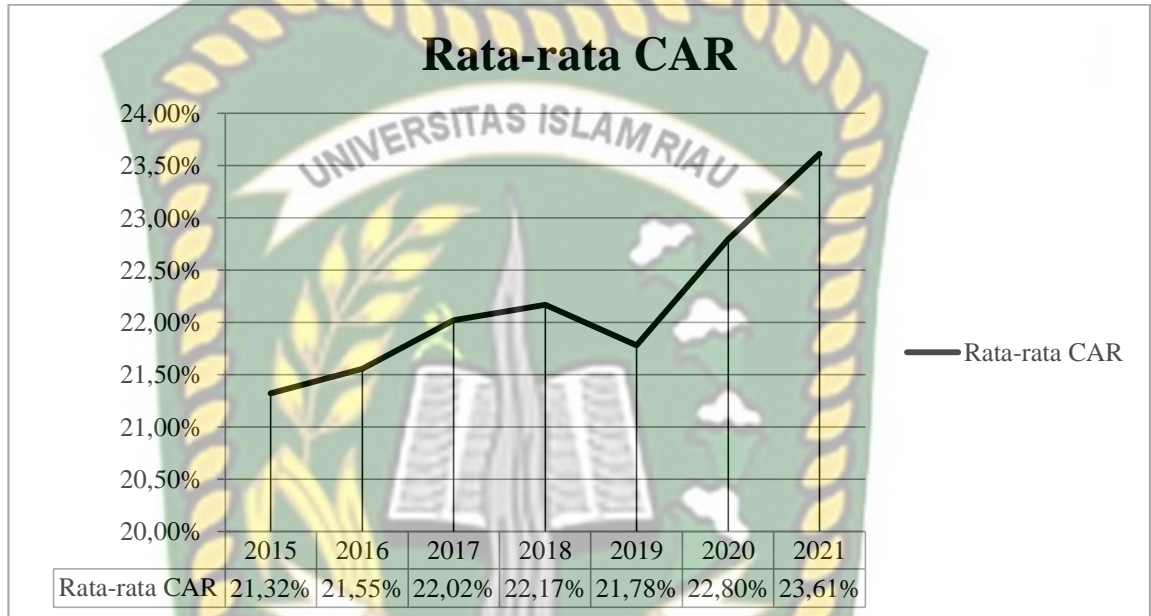
5.1.2. Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR merupakan ratio yang memperlihatkan seberapa besar aktiva yang mengandung resiko (surat berharga, kredit, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Pada Gambar 5.2 Berikut dapat dilihat perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada BPD di Indonesia periode 2015 sampai dengan 2021:

Gambar 5.2
Capital Adequacy Ratio (CAR) Perusahaan Sampel



Sumber: data diolah. 2022

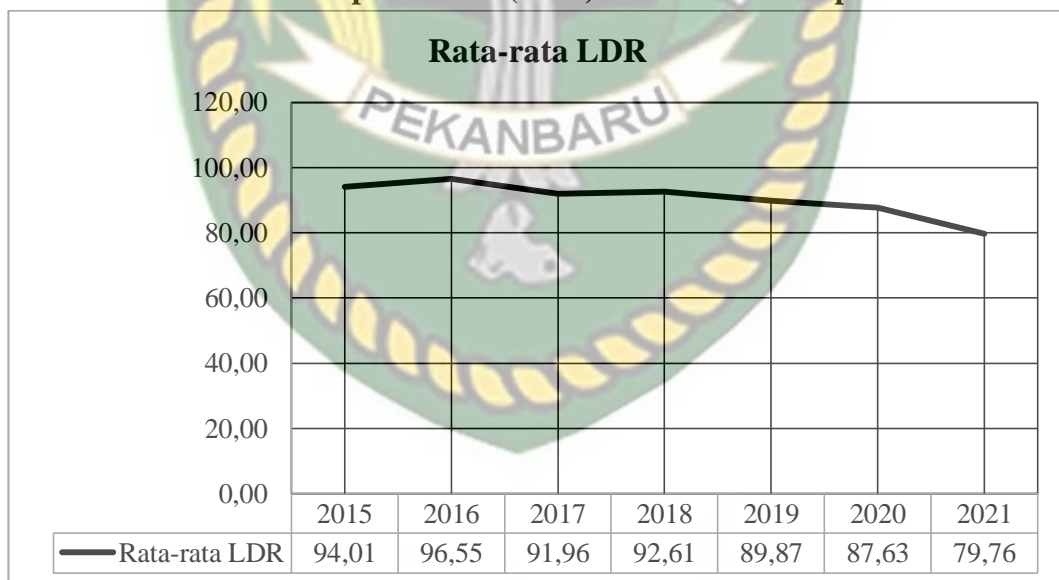
Berdasarkan gambar 5.2 terlihat perkembangan nilai rata-rata CAR pada tahun 2015 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Dimulai pada tahun 2015 nilai rata-rata CAR sebesar 21,32%, mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 21,55% yang kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2017 sebesar 22,02%. Kemudian meningkat lagi sebesar 22,17% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 nilai rata-rata CAR mengalami penurunan menjadi 21,78% dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 22,80%. Dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 23,61%.

5.1.3. Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas suatu bank sehingga kemungkinan suatu bank bisa dalam kondisi bermasalah yang semakin besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito dan giro. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai:

Pada Gambar 5.3 berikut dapat dilihat perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada BPD di Indonesia periode 2015 sampai dengan 2021:

Gambar 5.3
Loan to Deposit Ratio (LDR) Perusahaan Sampel



Sumber: data diolah. 2022

Pada gambar 5.3 menunjukkan nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) pada tahun 2015 sampai dengan 2021. Nilai rata-rata LDR pada tahun 2015 sebesar 94,01% meningkat menjadi 96,55% ditahun 2016. Kemudian pada tahun 2017

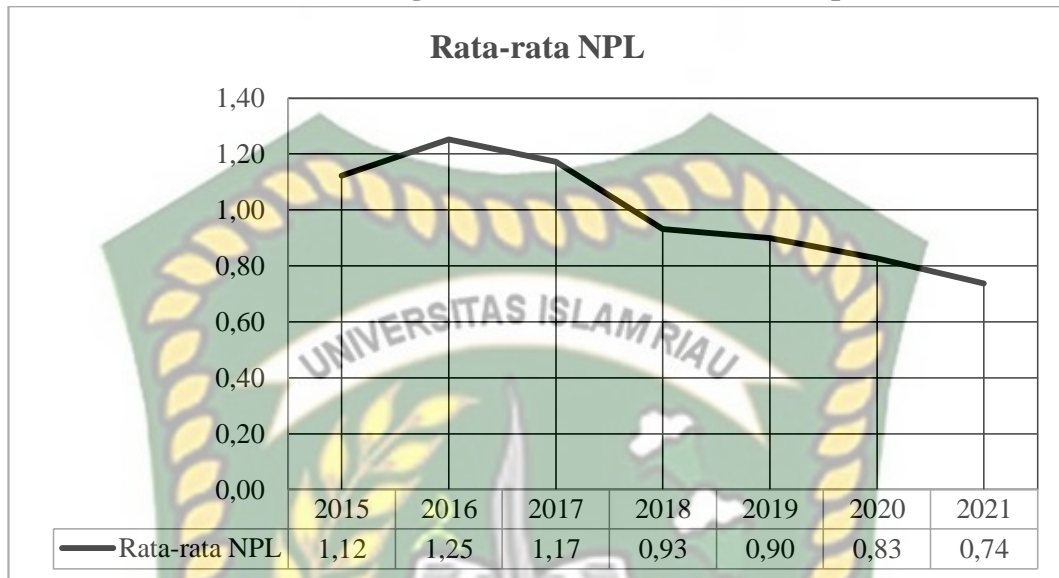
mengalami penurunan menjadi 91,96% dan meningkat menjadi 92,61% di tahun 2018. Pada tahun 2019 nilai rata-rata LDR mengalami penurunan menjadi 89,87% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 87,63%. Dan pada tahun 2021 nilai rata-rata LDR mengalami penurunan kembali menjadi 79,76%.

5.1.4. Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio antara kredit bermasalah dengan kredit yang disalurkan. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Semakin tinggi rasio NPL, dapat disimpulkan ada yang salah dengan kinerja bank tersebut. Sementara itu jika rasio NPL-nya kecil, dapat disimpulkan kinerja bank tersebut baik dan memenuhi fungsinya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Pada Gambar 5.4 berikut dapat dilihat perkembangan NPL pada BPD di Indonesia periode 2015 sampai dengan 2021:

Gambar 5.4
Non Performing Loan (NPL) Perusahaan sampel



Sumber: data diolah. 2022

Berdasarkan gambar 5.4 menunjukkan nilai rata-rata NPL pada tahun 2015 sampai dengan 2021. Pada tahun 2015 nilai rata-rata NPL sebesar 1,12% yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 1,25%. Pada tahun 2017 nilai rata-rata NPL mengalami penurunan menjadi 1,17% yang kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,93%, pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 0,90%, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 0,83%, dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 0,74%.

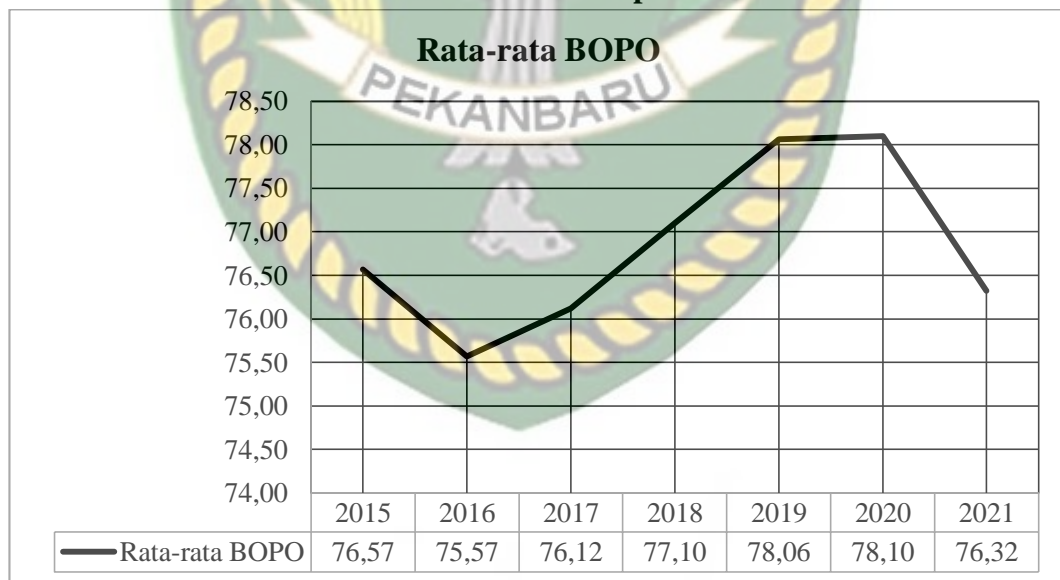
5.1.5. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO berpengaruh besar dalam mengukur tingkat efisiensi dan juga kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya

operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank, sehingga kemungkinan suatu bank bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pada Gambar 5.5 berikut dapat dilihat hasil perhitungan dai Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) pada BPD di Indonesia periode 2015 sampai dengan 2021:

Tabel 5.5
Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)
Perusahaan Sampel



Sumber: data diolah. 2022

Berdasarkan gambar 5.5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata BOPO pada tahun 2015 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 nilai rata-

rata BOPO sebesar 76,57%, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 75,57%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 76,12%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 77,10%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 78,06% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebesar 78,10%. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 76,32%.

5.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Regresi data panel memiliki gabungan karakteristik yaitu data yang terdiri atas beberapa objek dan meliputi waktu. Data semacam ini memiliki keunggulan terutama karena bersifat *robust* (kuat) terhadap beberapa tipe pelanggaran yakni heterokedastisitas dan normalitas.

Regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model yaitu *pooled*, *fixed effect* dan *random effect*. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik yang benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara statistik. Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih model dari ketiga yang tersedia.

Setelah hasil dari model *common effect* dan *fixed effect* diperoleh maka selanjutnya dilakukan uji chow. Pengujian tersebut dibutuhkan untuk memilih model yang paling tepat diantara model *common effect* dan *fixed effect*. Hasil dari uji chow dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.084117	(23,140)	0.0000
Cross-section Chi-square	102.006163	23	0.0000

Sumber: Eviews, data diolah. 2022

Berdasarkan tabel uji Chow di atas, kedua nilai probabilitas Cross Section F dan Chi Square yang lebih kecil dari 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi model terbaik yang digunakan adalah model dengan menggunakan metode Fixed Effect. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian menggunakan Uji Hausman dengan menggunakan model *random effect*, untuk menentukan model mana yang tepat. Hasil pengujian menggunakan Uji Hausman dapat dilihat pada tabel 5.2

Tabel 5.2
Hasil Uji Hausman

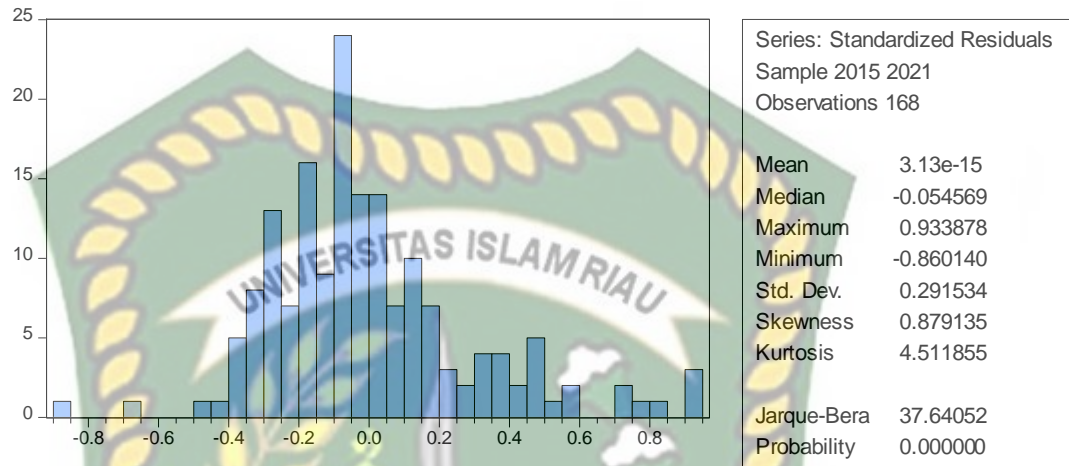
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.053052	4	0.7260

Sumber: Eviews. Data Olahan. 2022

Berdasarkan tabel uji Hausman di atas, untuk nilai probabilitas Cross Section Random 0,7260 lebih besar dari 0,05. Sehingga menerima hipotesis nol. Jadi model terbaik yang digunakan adalah model dengan menggunakan metode *Random Effect Model (REM)*.

5.3 Uji Asumsi Klasik

5.3.1 Uji Normalitas



Dari hasil pengujian di atas, terlihat bahwa nilai dari Jarque-Bera sebesar 37.64052 dengan probability 0,000000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05, yang artinya residual tidak terdistribusi normal.

Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat *BLUE (Best Linear Unbias Estimator)* dan beberapa pendapat tidak mengharuskan adanya syarat ini sebagai sesuatu yang wajib untuk dipenuhi (Nachrowi : 2006).

5.3.2 Uji Multikolinearitas

Salah satu cara untuk mengetahui multikolinearitas dalam suatu model adalah dengan melihat koefisien korelasi hasil output komputer. Jika terdapat koefisien korelasi yang lebih besar dari $|0,9|$ maka terdapat gejala multikolinearitas. Berikut adalah hasil output koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel 5.3

Tabel 5.3
Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.259765	-0.121917	-0.502032
X2	-0.259765	1.000000	-0.116634	0.518366
X3	-0.121917	-0.116634	1.000000	-0.101964
X4	-0.502032	0.518366	-0.101964	1.000000

Sumber: Eviews. Data Olahan 2022

Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai koefisien korelasi di atas, masing-masing variabel mempunyai nilai koefisien $< 0,9$, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas.

5.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual tetap dari hasil pengamatan satu ke pengamatan lainnya, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.457786	0.408887	1.119589	0.2648
X1	0.002413	0.006474	0.372718	0.7099
X2	-0.012449	0.021624	-0.575710	0.5657
X3	0.002277	0.001553	1.465982	0.1449
X4	-0.006360	0.004104	-1.549674	0.1235

Sumber: Eviews. Data olahan 2022

Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat hasil dari uji heteroskedastisitas dengan pengujian uji glejser yang dimana hasil probabilitas dari setiap variabel independen memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Yang berarti bahwa model ini terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas, sehingga tidak perlu dilakukan kembali regresi dengan pembobotan *white*.

5.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahannya pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Tabel 5.5
Hasil Uji Autokorelasi

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.084117	(23,140)	0.0000
Cross-section Chi-square	102.006163	23	0.0000

Sumber: Eviews. Data Olahan 2022

Dari hasil pengujian di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Chi-square $< 0,05$, maka terjadi gejala autokorelasi.

Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau *panel*) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti (Nachrowi : 2006).

5.4 Pengujian Hipotesis dengan Regresi Data Panel

5.4.1 Pengaruh Variabel CAR, NPL, LDR, dan BOPO terhadap ROA secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis uji-F ini digunakan untuk menghitung apakah secara bersama-sama (simultan) variabel independen yang ada berpengaruh terhadap variabel dependennya. Apabila nilai F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan (keseluruhan) mempengaruhi variabel dependennya.

Apabila nilai F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya.

Uji hipotesis secara simultan menggunakan uji F, seperti berikut:

Tabel 5.6
Hasil Uji F

F-statistic	148.4774
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews. Data Olahan 2022

Dengan hipotesis:

H_0 = tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel CAR, NPL, LDR, dan BOPO secara simultan terhadap ROA

H_1 = terdapat pengaruh signifikan antara variabel CAR, NPL, LDR, dan BOPO secara simultan terhadap ROA

Berdasarkan hasil output eviews pada tabel 5.9 di atas, nilai F hitung yaitu sebesar 148.4774, sementara F tabel dengan tingkat 5% adalah sebesar 2,90. Dengan demikian F hitung $>$ F tabel ($148.4774 > 2,90$), kemudian juga terlihat

dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,000000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CAR, NPL, LDR, dan BOPO secara bersama-sama (simultan) terhadap ROA, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

5.4.2 Pengaruh Variabel CAR, NPL, LDR, dan BOPO terhadap ROA secara Parsial (Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial (individu) dari variabel-variabel independen (CAR, NPL, LDR dan BOPO) terhadap variabel dependen (ROA).

Apabila nilai probabilitas t lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara parsial menggunakan uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.739113	0.528428	18.43034	0.0000
X1	-0.009922	0.008136	-1.219589	0.2244
X2	0.032759	0.027730	1.181343	0.2392
X3	0.013049	0.001994	6.543031	0.0000
X4	-0.106973	0.005051	-21.17937	0.0000

Sumber: Eviews. Data Olahan 2022

Penjelasan dari hasil uji t di atas adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh CAR (X1) terhadap ROA (Y)

Hasil uji t pada variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* memiliki nilai t-hitung sebesar -1.219589, sementara nilai t-tabel dengan $\alpha = 5\%$ dan $df = (n-k)$, $df = 163$ dimana nilai t-tabel adalah sebesar 1.65426 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($-1.219589 < 1.65426$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,2244 yang lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tidak memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)*.

b. Pengaruh NPL (X2) terhadap ROA (Y)

Dari hasil uji t pada variabel *Non Performing Loan (NPL)* memiliki nilai t-hitung sebesar 1.181343, sementara nilai t tabel sebesar 1.6542. dimana nilai t-tabel adalah sebesar 1.65426 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($1.181343 < 1.65426$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0.2392 yang lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti *Non Performing Loan (NPL)* tidak memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)*.

c. Pengaruh LDR (X3) terhadap ROA (Y)

Dari hasil uji t pada variabel *Loan to Deposit Ratio (LDR)* memiliki nilai t-hitung sebesar 6.543031, sementara nilai t tabel sebesar 1.6542. dimana nilai t-tabel adalah sebesar 1.65426 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($6.543031 > 1.65426$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_1

diterima. Hal ini berarti *Loan to Deposit Ratio (LDR)* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.

d. Pengaruh BOPO (X4) terhadap ROA (Y)

Dari hasil uji t pada variabel *Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)* memiliki nilai t-hitung sebesar -21.17937, sementara nilai t tabel sebesar 1.6542. dimana nilai t-tabel adalah sebesar 1.65426 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($-21.17937 > -1.6542$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima. Hal ini berarti *Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.

5.4.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Koefisien determinasi (Adjusted R-Square) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai adjusted R-Square yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.784651
Adjusted R-squared	0.779366

Sumber: Eviews. Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel di atas besar angka Adjusted R-square (R^2) adalah 0.779366. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 77,94% terhadap variabel dependennya. Sisanya 22,06% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi tersebut.

5.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis regresi yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan yang dapat ukur dari CAR, NPL, LDR, BOPO terhadap ROA. Berikut ini merupakan tabel yang merangkum hubungan yang terjadi pada variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5.9
Tabel Hubungan Variabel Independen terhadap ROA

Variabel	Hubungan yang ditemukan	Signifikansi
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Tidak ada pengaruh	Tidak Signifikan
<i>Non Performing Loan (NPL)</i>	Tidak ada pengaruh	Tidak Signifikan
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Berpengaruh	Signifikan
<i>Beban Operasional dan Pendapatan operasional (BOPO)</i>	Berpengaruh	Signifikan

5.5.1 Variabel CAR terhadap ROA

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh CAR terhadap ROA, sehingga peningkatan atau penurunan CAR tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Hal ini dapat terjadi karena disebabkan fenomena data laporan keuangan bank penelitian pada waktu periode penelitian. Dimana nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) mengalami kenaikan tetapi Return on Asset (ROA) mengalami penurunan. Penyebab lain kemungkinan bank masih banyak dana yang tidak disalurkan untuk kredit sehingga keuntungan tidak maksimal. Hal ini berarti bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA sebagai kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad M, Kowsar H dan Abdul M (2015); Bambang S (2010); Farah M, Marsheilly P (2013); Palupi L S, Sri U (2015); Ahmad A (2014), yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap ROA.

5.5.2 Variabel NPL terhadap ROA

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh NPL terhadap ROA, sehingga peningkatan atau penurunan CAR tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Hal ini berarti bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap ROA sebagai kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Hal ini terjadi karena terjadinya kredit bermasalah yang disebabkan tidak tertagihnya suatu pinjaman yang dilakukan oleh debitur maka pihak bank berusaha mengantisipasinya

dengan menjual agunan yang dimiliki debitur yang bersangkutan akibat tidak bias membayar pinjamannya untuk menutupi kredit bermasalah yang terjadi dan menutupnya dengan bertambahnya aset yang dimiliki akibat penjualan agunan debitur yang bersangkutan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad M, Koswar H & Abdul M (2015) dalam penelitiannya menguji pengaruh NPL terhadap ROA hasil penelitiannya menunjukkan hasil yang negatif signifikan terhadap ROA

5.5.3 Variabel LDR terhadap ROA

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return on Asset (ROA), sehingga peningkatan atau penurunan LDR sangat berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Hal ini berarti bahwa LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA sebagai kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan keefektifitasan bank dalam menyalurkan kredit, sehingga bank mampu memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang S (2010) meneliti hubungan LDR dengan ROA dan hasil penelitiannya LDR berpengaruh positif terhadap ROA

5.5.4 Variabel BOPO terhadap ROA

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return on Asset (ROA), sehingga peningkatan atau penurunan BOPO sangat berpengaruh

terhadap Return On Asset (ROA). Hal ini dikarenakan kinerja manajemen bank kurang baik sehingga pengeluaran biaya operasional menjadi tinggi akan berakibat profitabilitas bank menurun. Hal ini berarti bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA sebagai kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

Penelitian tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mohammad M, Koswar H & Abdul M (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BOPO mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ROA



BAB VI

KESIMPULAN

6.5.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh terhadap Return On Asset (ROA) Bank Pembangunan Daerah. Kemungkinan bank masih banyak dana yang tidak disalurkan untuk kredit sehingga keuntungan tidak maksimal.
2. Non Performing Loan (NPL) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh terhadap Return On Asset (ROA) Bank Pembangunan Daerah. Hal ini terjadi karena terjadinya kredit bermasalah yang disebabkan tidak tertagihnya suatu pinjaman yang dilakukan oleh debitur maka pihak bank berusaha mengantisipasinya dengan menjual agunan yang dimiliki debitur yang bersangkutan akibat tidak bias membayar pinjamannya untuk menutupi kredit bermasalah yang terjadi dan menutupnya dengan bertambahnya aset yang dimiliki akibat penjualan agunan debitur yang bersangkutan.
3. Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap Return On Asset (ROA) Bank Pembangunan Daerah. Hal ini dikarenakan keefektifitasan bank dalam menyalurkan kredit, sehingga bank mampu memenuhi kewajibannya.

4. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap Return On Asset (ROA) Bank Pembangunan Daerah. Hal ini dikarenakan kinerja manajemen bank kurang baik sehingga pengeluaran biaya operasional menjadi tinggi akan berakibat profitabilitas bank menurun
5. Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa seluruh variabel bebas Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan to Deposits Ratio, dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Asset.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada peneliti mendatang dengan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi bank pembangunan daerah diharapkan lebih memperhatikan nilai dari Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Biaya Operasional dan pendapatan Operasional (BOPO), agar kinerja dan profitabilitas dari Bank Pembangunan Daerah itu sendiri dapat lebih baik. Selain itu, juga dapat dilakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan arus kas, dan dapat meningkatkan efisiensi operasional Bank Pembangunan Daerah dengan menekan pembiayaan operasional sekecil mungkin.
2. Bagi investor, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi para investor dan calon

investor sebelum berinvestasi pada suatu perusahaan di Bank Pembangunan Daerah. Selain itu, bagi para investor yang ingin melakukan investasi jangka panjang pada suatu perusahaan, harus dipertimbangkan dengan baik sebelum membuat keputusan investasi. Pilihlah perusahaan perbankan yang mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara efisien.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, A., & Giri, I. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank yang terdaftar di. 4(1), 26–39.
- Barrimi, M., Aalouane, R., Aarab, C., Hafidi, H., Baybay, H., Soughi, M., Tachfouti, N., Nejari, C., Mernissi, F. Z., Rammouz, I., & McKenzie, R. B. (2013). Pengertian Laporan Keuangan Menurut. *Encephale*, 53(1), 21. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>
- Edwar Yokeu Bernardin, D. (2016). Pengaruh Car Dan Ldr Terhadap Return on Assets. IV(2), 232–241. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>
- Fadila, d., & Yuliani, Y. (2015). Peran Roa Sebagai Pemeditasi Car, Npl Dan Ldr Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 13(2), 217–228. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v13i2.3350>
- Fernos, J., & Dona, E. (2018). Analisis Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Return On Assets PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. *Jurnal Pundi*, 2(2), 107–118. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.73>
- Kansil, D., Murni, S., Tulung, J. E., Risiko, P., Kansil, D., Murni, S., Tulung, J. E., Manajemen, J., Ekonomi, F., Daerah, P., Data, I., Jumlah, I., Pembangunan, B., Kemudian, R. O. A., Character, D., Manajemen, P., Umum, B., Npl, T. R. R., & Roa, B. (2017). Pengaruh risiko perbankan terhadap kinerja keuangan tahun 2013-2015 (bank pembangunan daerah se-indonesia). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(3), 3508–3517. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i3.17581>

- Kossoh, A. M. (2017). Pengaruh non performing loan (npl), capital adequacy ratio (car), loan to deposits ratio (ldr) terhadap profitabilitas pada bank pembangunan daerah (bpd) se-indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(3), 2721–2730. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i3.17150>
- Lamria Sagala, Cristina Silitonga, Sarmakti Situmorang, T. S. T. (2019). Pengaruh Car, Npl, Dan Bopo Terhadap Roa Pada Bank Daerah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 249–260.
- Latifah, N., Rodhiyah, R., & Saryadi, S. (2012). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Loan (Npl) Dan Loan To Deposit Ratio (Ldr) Terhadap Return on Asset (Roa) (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2010). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis S1 Undip*, 1(1), 57–66.
- Lukitasari, Y. P., & Kartika, A. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 166–176. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/3724>
- Maulana, P., Dwita, S., & Helmayunita, N. (2021). Pengaruh CAR, NPL, LDR dan BOPO Terhadap Return ON Assets (ROA) pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 316–328. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.355>
- Menurut Roos, W. & J. (2004:78). (2012). Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur,

menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. E-Prints Universitas Negeri Yogyakarta, 5–15.

Pebriyana, S. D. M. (1998). Analisis Rasio Profitabilitas Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. 10, 1–11.

Putra, A. F. (2013). Pengaruh LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR Dan FACR Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. 1–18.

Sam, F. (2012). Analisis Pengaruh LDR, NPL dan ROA terhadap CAR pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Se-Indonesia Tahun 2007-2011. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8794/2/fatwalsam-1459-1-12-fat-m_1-2.pdf

Setyorini, W. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia (Periode Tahun 2007-2010). Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 4(4), 179–186.

Soemarsono. (2010). Pengertian Laporan Keuangan Menurut Para Ahli. [Www.Dosenpendidikan.Co.Id,7 26 https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-laporan-keuangan/](http://www.dosenpendidikan.co.id/726/pengertian-laporan-keuangan/)

Suciaty, A., Haming, M., & Alam, N. (2019). Pengaruh CAR, BOPO, NPL dan LDR Terhadap ROA pada Bank BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Center Of Economic Student Journal, 2(3), 57–74.

Suwandi, J. (2017). Pengaruh CAR, NPL, BOPO dan LDR Terhadap ROA Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Wulandari, S., Febriatmoko, B., & Hardiyanti, W. (2016). Analisis Rasio Keuangan Perbankan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Bank (Studi Kasus PT. Bukopin (Persero), Tbk periode 2014-2015). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 5(2), 167–178.

www.ojk.co.id

